



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya diperlukan pendidikan dan pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengenai pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur perlu disusun standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3970);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);

12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1133);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Teknis dan Fungsional yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan Golongan II Serta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan/Atau Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);
17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
18. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);

19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
20. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);
21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Landak.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun menurut bagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun menurut bagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan didalam ataupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu.
11. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
12. Pendidikan dan Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan keahlian, pengetahuan dan prilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang pelaksanaan Pelatihan Dasar atau Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional serta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dengan sumber pembiayaan baik sebagian atau keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;

### Pasal 3

Jenis Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Seleksi terbuka yang diselenggarakan meliputi:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas;
- c. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
- f. Pendidikan Tugas Belajar;
- g. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi; dan

h. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah.

### BAB III STANDAR SATUAN BIAYA

#### Pasal 4

- (1) Rincian Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rincian Standar Biaya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV JENIS DAN BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DAN SELEKSI TERBUKA

#### Pasal 5

Standar Biaya Pengembangan Kompetensi Aparatur meliputi :

- a. Pengembangan Kompetensi Aparatur dengan Kontribusi/Setoran Biaya;
- b. Pengembangan Kompetensi Aparatur dengan Penyelenggaraan Sendiri.

#### Pasal 6

- (1) Biaya Pengembangan Kompetensi Aparatur dengan Kontribusi/Setoran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. Pelatihan Kepemimpinan, yang terdiri dari :
    1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II,
    2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
    3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
  - b. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Gol. II, dan Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau KII dan Non Honorer melalui Pengangkatan Khusus; dan
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, yang terdiri atas :
    1. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 4 hari;
    2. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 7 hari;
    3. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 9 hari;
    4. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 10 hari;
    5. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 12 hari;
    6. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 21 hari;
    7. Pendidikan dan Pelatihan t samai dengan 27 hari;
    8. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 35 hari;
    9. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 45 hari;
    10. Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 50 hari.
- (2) Biaya dengan Penyelenggaraan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
  - a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - b. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan

- I, Gol. II, dan Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau KII dan Non Honorer melalui Pengangkatan Khusus;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
  - e. Tugas Belajar;
  - f. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - g. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah.

#### Pasal 7

Dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, standar biaya pendidikan dan pelatihan dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah kabupaten landak berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran;
- b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Di Undangkan di Ngabang

Pada tanggal, 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 684

## PENJELASAN

### RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR POLA PENYELENGGARAAN SENDIRI

#### A. Diklat Teknis dan Fungsional

##### 1. Honorarium Narasumber

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan pelatihan.

Catatan :

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan narasumber/pembahas berasal dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten landak.
3. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam satuan kerja Pemerintah Kabupaten Landak, maka diberikan honorarium 50 % (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber/pembahas

##### 2. Honorarium Penyelenggara Pelatihan

###### 2.1 Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1.1 Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2.1.2 Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara;
- 2.1.3 Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

###### 2.2 Pengajar

2.2.1. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

2.2.2. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya

###### 2.3 Penyusun Modul Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

###### 2.4 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sabagai berikut :

- 2.4.1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - 2.4.2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - 2.4.3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;
  - 2.4.4. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
3. Uang harian peserta pelatihan  
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan.

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR  
 POLA KONTRIBUSI

| NO | URAIAN   | SATUAN  | BIAYA | KETERANGAN |
|----|--|---|-------|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4     | 5          |
| A. | Diklat Kepemimpinan  |   |       |            |
|    | 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II/Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II |   |       |            |
|    | a)   | Setoran Diklat  | OK    | 30.261.000 |
|    | b)   | Bantuan Pengadaan ATK   | OK    | 10.000.000 |
|    | c)   | Bantuan Biaya Kesehatan   | OK    | 2.250.000  |
|    | d)   | Bantuan Buku Pengadaan Referensi  | OK    | 7.000.000  |
|    | e)   | Bantuan Perlengkapan Peserta  | OK    | 825.000    |
|    | f)   | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak dalam Provinsi | OK    | 10.910.000 |
|    | g)   | Uang Harian Diklat  | OH    | 110.000    |
|    | 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III    |   |       |            |
|    | a)   | Setoran Diklat  | OK    | 22.125.000 |
|    | b)   | Pengadaan ATK   | OK    | 8.324.000  |
|    | c)   | Biaya Kesehatan   | OK    | 1.500.000  |
|    | d)   | Fotocopy/ Pengadaan   | OK    | 5.000.000  |
|    | e)   | Perlengkapan Peserta  | OK    | 800.000    |
|    | f)   | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak dalam Provinsi | OK    | 1.000.000  |
|    | g)   | Bantuan Transportasi dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak Luar Provinsi  | OK    | 10.910.000 |
|    | h)   | Uang Harian Diklat  | OH    | 110.000    |
|    | 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/ Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV           |   |       |            |
|    | a)   | Setoran Diklat  | OK    | 20.230.000 |
|    | b)   | Pengadaan ATK   | OK    | 3.738.000  |
|    | c)   | Biaya Kesehatan   | OK    | 1.500.000  |
|    | d)   | Fotocopy/Pengadaan  | OK    | 3.000.000  |
|    | e)   | Perlengkapan Peserta  | OK    | 500.000    |
|    | f)   | Bantuan Transportasi dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak                | OK    | 1.000.000  |

|   |    |   |    |            |   |
|---|----|---|----|------------|---|
|   | g) | Uang Harian Diklat  | OH | 10.910.000 |   |
| <b>B. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III</b>               |    |   |    |            |   |
|   | a) | Setoran Diklat  | OK | 9.296.000  |   |
|   | b) | Pengadaan ATK   | OK | 3.274.000  |   |
|   | c) | Biaya Kesehatan   | OK | 1.000.000  |   |
|   | d) | Fotocopy/Pengadaan  | OK | 1.880.000  |   |
|   | e) | Perlengkapan Pembelajaran Kesiapsiagaan Bela Negara                       | OK | 2.000.000  |   |
|   | f) | Percetakan Laporan  | OK | 600.000    |   |
|   | g) | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak dalam Provinsi | OK | 1.000.000  |   |
|   | h) | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak luar Provinsi  | OK | 10.910.000 |   |
|   | i) | Uang Harian Diklat  | OH | 110.000    |   |
| <b>C. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Kategori 1 dan 2</b> |    |   |    |            |   |
|   | a) | Setoran Diklat  | OK | 2.242.000  |   |
|   | b) | Pengadaan ATK   | OK | 2.048.000  |   |
|   | c) | Biaya Kesehatan   | OK | 680.000    |   |
|   | d) | Fotocopy/Pengadaan  | OK | 1.200.000  |   |
|   | e) | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak dalam Provinsi | OK | 1.000.000  |   |
|   | f) | Bantuan Transportasi Dilaksanakan di Luar Kabupaten Landak luar Provinsi  | OK | 5.455.000  |   |
|   | g) | Uang Harian Diklat  | OH | 110.000    |   |
| <b>D. Diklat Teknis dan Fungsional</b>                              |    |   |    |            |   |
| <b>1 Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD</b>            |    |   |    |            |   |
|   | a) | Diklat 3 hari   | OK | 2.875.000  | Diatur dalam PP Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri                                     |
|   | b) | Diklat 4 hari   | OK | 3.350.000  |   |
|   | c) | Diklat 5 hari   | OK | 3.750.000  |   |
| <b>2 Tingkat Pelaksana Teknis</b>                                   |    |   |    |            |   |
|   | a) | Diklat sampai dengan 4 hari   | OK | 2.900.000  | Diatur dalam PP Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Kepala LAN no 1 tahun |
|   | b) | Diklat sampai dengan 5 hari   | OK | 3.200.000  |   |
|   | c) | Diklat sampai dengan 7 hari   | OK | 4.500.000  |   |
|   | d) | Diklat sampai dengan 9 hari   | OK | 5.100.000  |   |
|   | e) | Diklat sampai dengan 10 hari  | OK | 5.500.000  |   |
|   | f) | Diklat sampai dengan 12   | OK | 5.400.000  |   |

|  |   |                              |    |            |  |
|--|---|------------------------------|----|------------|--|
|  |   | hari                         |    |            | 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Teknis Fungsional yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Administrasi Negara |
|  | g | Diklat sampai dengan 15 hari | OK | 6.125.000  |  |
|  | h | Diklat sampai dengan 21 hari | OK | 7.425.000  |  |
|  | i | Diklat sampai dengan 27 hari | OK | 9.825.000  |  |
|  | j | Diklat sampai dengan 35 hari | OK | 12.125.000 |  |
|  | k | Diklat sampai dengan 45 hari | OK | 15.375.000 |  |
|  | l | Diklat sampai dengan 50 hari | OK | 17.750.000 |  |

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR                   TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR  
 POLA FASILITASI

| NO | URAIAN  | SATUAN  | BIAYA      | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4          | 5          |
| A. | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/ Diklatpim Tk. IV |   |            |            |
|    | 1. Honorarium Penyelenggara                       |   |            |            |
|    | a Honorarium Tenaga Akademis                      |   |            |            |
|    | 1)  | Penceramah  | OJ         | 1.000.000  |
|    | 2)  | Pengajar / Widyaiswara  | OJ         | 250.000    |
|    | 3)  | Pembimbing/Coach  | OJ         | 200.000    |
|    | 4)  | Penguji   | OJ         | 200.000    |
|    | 5)  | Mentor  | OJ         | 200.000    |
|    | b Petugas Diklat                                  |   |            |            |
|    | 1)  | Pendamping ASN/Pengamat ASN / Pendamping Non ASN/Pengamat Non ASN | OJ         | 100.000    |
|    | 2)  | Moderator/Asisten Pengajar  | OS         | 100.000    |
|    | 3)  | Operator  | OH         | 100.000    |
|    | 4)  | Notulen   | OS         | 100.000    |
|    | 5)  | Petugas Kebersihan  | OK         | 500.000    |
|    | 6)  | Petugas Keamanan  | OK         | 500.000    |
|    | 7)  | Petugas Kesehatan   | OK         | 500.000    |
|    | 8)  | Instruktur Senam  | OS         | 50.000     |
|    | c Honorarium Fasilitator Provinsi                 |   |            |            |
|    | 1)  | Tim monitoring dan evaluasi penyelenggara                         | OK         | 1.000.000  |
|    | 2)  | Penyusun naskah ujian   | OK         | 1.000.000  |
|    | 3)  | Pengoreksi ujian  | Org/Naskah | 20.000     |
|    | 4)  | Pengawas ujian  | OK         | 200.000    |
|    | 5)  | Pembukaan dan Penutupan   | OK         | 500.000    |
|    | 2. Benchmarking / Studi Lapangan                  |   |            |            |
|    | a   | Studi Lapangan Pelayanan Publik                                   | OK         | 2.000.000  |
|    | 3. Bahan-Bahan                                    |   |            |            |
|    | a   | Pengadaan ATK Peserta   | Paket      | 738.000    |
|    | b   | Pencetakan Buku Panduan   | Paket      | 150.000    |
|    | c   | Pencetakan Modul Pembelajaran                                     | Paket      | 700.000    |
|    | d   | Pencetakan dan Penulisan STTP                                     | Lembar     | 100.000    |
|    | e   | Tranning Kit/Perlengkapan Peserta                                 | Peserta    | 350.000    |

|    |   |  |            |           |  |
|----|---|--|------------|-----------|--|
|    | f   | Surat Menyurat   | Paket      | 1.000.000 |  |
|    | g   | Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan                                  | Paket      | 2.500.000 |  |
|    | 4   | Uang Harian Peserta Diklat   | OH         | 110.000   |  |
| B. | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III dan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau KII dan Non Honorer melalui Pengangkatan Khusus |  |            |           |  |
|    | 1.  | Honorarium Penyelenggara   |            |           |  |
|    |   | a Honorarium Tenaga Akademis   |            |           |  |
|    |   | 1) Penceramah  | OJ         | 1.000.000 |  |
|    |   | 2) Pengajar / Widyaiswara  | OJ         | 250.000   |  |
|    |   | 3) Pembimbing/Coach  | OJ         | 200.000   |  |
|    |   | 4) Penguji   | OJ         | 200.000   |  |
|    |   | 5) Mentor  | OJ         | 200.000   |  |
|    |   | b Petugas Diklat   |            |           |  |
|    |   | 1) Pendamping ASN/Pengamat ASN / Pendamping Non ASN/Pengamat Non ASN | OJ         | 100.000   |  |
|    |   | 2) Moderator/Asisten Pengajar  | OS         | 100.000   |  |
|    |   | 3) Operator  | OH         | 100.000   |  |
|    |   | 4) Notulen   | OS         | 100.000   |  |
|    |   | 5) Petugas Kebersihan  | OK         | 500.000   |  |
|    |   | 6) Petugas Keamanan  | OK         | 500.000   |  |
|    |   | 7) Petugas Kesehatan   | OK         | 500.000   |  |
|    |   | 8) Instruktur Senam  | OS         | 50.000    |  |
|    |   | c Honorarium Fasilitator Provinsi                                    |            |           |  |
|    |   | 1) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggara                         | OK         | 1.000.000 |  |
|    |   | 2) Penyusun naskah ujian   | OK         | 1.000.000 |  |
|    |   | 3) Pengoreksi ujian  | Org/Naskah | 20.000    |  |
|    |   | 4) Pengawas ujian  | OK         | 200.000   |  |
|    |   | 5) Pembukaan dan Penutupan   | OK         | 500.000   |  |
|    | 2.  | Bahan-Bahan  |            |           |  |
|    |   | a Pengadaan ATK Peserta  | Paket      | 738.000   |  |
|    |   | b Pencetakan Buku Panduan  | Paket      | 150.000   |  |
|    |   | c Pencetakan Modul Pembelajaran                                      | Paket      | 500.000   |  |
|    |   | d Pencetakan dan Penulisan STTP                                      | Lembar     | 100.000   |  |
|    |   | e Tranning Kit/Perlengkapan Peserta                                  | Peserta    | 350.000   |  |
|    |   | f Surat Menyurat   | Paket      | 1.000.000 |  |
|    |   | g Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan                                | Paket      | 2.500.000 |  |
|    | 3.  | Uang Harian Peserta Diklat   |            |           |  |
|    |   |  | OH         | 110.000   |  |
| C. | Seminar, Rapat Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus group discussion   |  |            |           |  |
|    | 1.  | Narasumber   |            |           |  |

|   |  |   |       |           |  |
|---|--|---|-------|-----------|--|
|   | a  | Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat                          | OJ    | 1.700.000 | Honorarium diberikan 50% dari honorarium narasumber jika nrasumeber berasal dari satuan kerja perangkat daerah Kab. Landak |
|   | b  | Narasumber Pakar/Praktisi/Guru Besar                          | OJ    | 1.400.000 |  |
|   | c  | Narasumber Pejabat Eselon I / yang disetarakan                | OJ    | 1.200.000 |  |
|   | d  | Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan               | OJ    | 1.000.000 |  |
|   | e  | Narasumber Pejabat Eselon III / yang disetarakan              | OJ    | 900.000   |  |
|   | f  | Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan       | OJ    | 700.000   |  |
| 2. Honorarium Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional |  |   |       |           |  |
|   | a  | Penceramah  | JP    | 1.000.000 |  |
|   | b  | Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah | JP    | 300.000   |  |
|   | c  | Pengajar yang berasal dri satuan kerja perangkat daerah       | JP    | 200.000   |  |
|   | d  | Penyusun Modul Pelatihan                                      | Modul | 5.000.000 |  |
|   | e  | Moderator   | OK    | 1.000.000 |  |
| 3. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan        |  |   |       |           |  |
|   | 1) Lama diklat s.d 5 hari  |   |       |           |  |
|   | a)   | Penanggung Jawab  | OK    | 450.000   |  |
|   | b)   | Ketua/Wakil Ketua   | OK    | 400.000   |  |
|   | c)   | Sekretaris  | OK    | 300.000   |  |
|   | d)   | Anggota   | OK    | 300.000   |  |
|   | 2) Lama diklat 6 s.d 30 hari   |   |       |           |  |
|   | a)   | Penanggung Jawab  | OK    | 675.000   |  |
|   | b)   | Ketua/Wakil Ketua   | OK    | 600.000   |  |
|   | c)   | Sekretaris  | OK    | 450.000   |  |
|   | d)   | Anggota   | OK    | 450.000   |  |
|   | 3) Lama diklat lebih dari 30 hari  |   |       |           |  |
|   | a)   | Penanggung Jawab  | OK    | 900.000   |  |
|   | b)   | Ketua/Wakil Ketua   | OK    | 800.000   |  |
|   | c)   | Sekretaris  | OK    | 600.000   |  |
|   | d)   | Anggota   | OK    | 600.000   |  |
|   | 4. Uang harian peserta Pelatihan   |   | OH    | 110.000   |  |
|   | 5. Uang harian panitia diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Landak   |   | OH    | 380.000   |  |
|   | 6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kredensial/Rekredensial/Asesmen Kompetensi Klinis, Audit Mutu profesi, dan Pembinaan Etika dan Disiplin Profesi pada Tenaga Kesehatan |   | OK    | 250.000   | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK 02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan                        |

Menteri  
Keuangan  
Nomor  
78/PMK.02/2  
019 tentang  
Standar Biaya  
Masukan  
Tahun  
Anggaran  
2020

|    |   |   |    |            |
|----|---|---|----|------------|
| D. | Bantuan Biaya Tugas Belajar kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak |   |    |            |
|    | 1. Program Diploma I, II dan Diploma III dan Diploma IV/Strata 1                |   |    |            |
|    | a) Biaya Kegiatan Pendidikan Perguruan Tinggi                                   |   |    |            |
|    | 1)  | uang kuliah dasar/uang pengembangan                       | OK | 25.000.000 |
|    | 2)  | uang kuliah semester/<br>Biaya Operasional Pendidikan/SPP | OS | 15.000.000 |
|    | b) Biaya Hidup dan Biaya Operasional  |   |    |            |
|    | 1)  | Diploma I, II dan Diploma III                             | OT | 16.070.000 |
|    | 2)  | Diploma IV dan Strata 1                                   | OT | 17.010.000 |
|    | 3)  | Biaya Pemberangkatan Awal                                 | OK | 2.000.000  |
|    | 4)  | Biaya Pengembalian Setelah Selesai                        | OK | 2.000.000  |
|    | c) Uang Buku dan Referensi  |   |    |            |
|    | 1)  | Diploma I dan II  | OT | 1.330.000  |
|    | 2)  | Diploma III   | OT | 1.590.000  |
|    | 3)  | Diploma IV dan Strata 1                                   | OT | 1.850.000  |
|    | 2. Program Strata 2/SP-1  |   |    |            |
|    | a) Biaya Kegiatan Pendidikan Perguruan Tinggi                                   |   |    |            |
|    | 1)  | uang kuliah dasar/uang pengembangan                       | OK | 40.000.000 |
|    | 2)  | uang kuliah semester/<br>Biaya Operasional Pendidikan/SPP | OS | 20.000.000 |
|    | b) Biaya Hidup dan Biaya Operasional  |   |    |            |
|    | 1)  | Strata-2 / spesialis 1                                    | OT | 20.000.000 |
|    | 2)  | Biaya Pemberangkatan Awal                                 | OK | 2.000.000  |
|    | 3)  | Biaya Pengembalian Setelah Selesai                        | OK | 2.000.000  |
|    | 4)  | Biaya Penelitian dan Tugas Akhir                          | OK | 7.500.000  |
|    | 5)  | Biaya Wisuda  | OK | 3.000.000  |
|    | c) 1)   | Uang Buku dan Referensi                                   | OT | 2.120.000  |
|    | 3. Program Strata 3/SP-2  |   |    |            |
|    | a) Biaya Kegiatan Pendidikan Perguruan Tinggi                                   |   |    |            |
|    | 1)  | uang kuliah dasar/uang pengembangan                       | OK | 30.000.000 |
|    | 2)  | uang kuliah semester/<br>Biaya Operasional Pendidikan/SPP | OS | 50.000.000 |
|    | b) Biaya Hidup dan Biaya Operasional  |   |    |            |

|   |    |    |   |                   |            |  |
|---|----|----|---|-------------------|------------|--|
|   |    | 1) | Strata-3 / spesialis 2  | OT                | 21.320.000 |  |
|   |    | 2) | Biaya Pemberangkatan Awal   | OK                | 2.000.000  |  |
|   |    | 3) | Biaya Pengembalian Setelah Selesai  | OK                | 2.000.000  |  |
|   |    | 4) | Biaya Penelitian dan Tugas Akhir  | OK                | 10.000.000 |  |
|   |    | 5) | Biaya Wisuda  | OK                | 3.000.000  |  |
|   |    | 6) | Uang Buku dan Referensi   | OK                | 2.380.000  |  |
|   | 4. |    | Biaya Notaris untuk Perjanjian Mahasiswa Tugas Belajar                                | OK                | 850.000    |  |
| <b>E. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</b>                     |    |    |   |                   |            |  |
| 1. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli                                |    |    |   |                   |            |  |
| a. Honor Panitia Seleksi Terbuka                                      |    |    |   |                   |            |  |
|   |    | 1) | Ketua   | OJ                | 1.000.000  |  |
|   |    | 2) | Anggota   | OJ                | 900.000    |  |
| b. Uji Kompetensi   |    |    |   |                   |            |  |
|   |    | 1) | Ketua   | OJ                | 1.000.000  |  |
|   |    | 2) | Anggota   | OJ                | 900.000    |  |
| c. Belanja Jasa Assesmen Center (Penilaian Kompetensi)                |    |    |   |                   |            |  |
|   |    | 1) | Assesment Center Metode Kompleks  | Orang per Jabatan | 7.500.000  |  |
|   |    | 2) | Assesment Center Metode Sedang  | Orang per Jabatan | 5.000.000  |  |
|   |    | 3) | Assesment Center Metode Sederhana   | Orang per Jabatan | 3.500.000  |  |
| <b>F. Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan</b>                      |    |    |   |                   |            |  |
|   | 1. |    | Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II                          | Per Peserta       | 1.300.000  |  |
|   | 2. |    | Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator                            | Per Peserta       | 1.300.000  |  |
|   | 3. |    | Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas                                 | Per Peserta       | 1.300.000  |  |
| <b>G. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah</b>   |    |    |   |                   |            |  |
| 1. Belanja Jasa Narasumber/Pembahasan/Moderator/Pembawa Acara/Panitia |    |    |   |                   |            |  |
| a. Honorarium Narasumber/Pembahas                                     |    |    |   |                   |            |  |
|   |    | 1) | Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara lainnya                             | OJ                | 1.700.000  |  |
|   |    | 2) | Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ                | 1.400.000  |  |
|   |    | 3) | Pejabat Eselon I/ yang disetarakan  | OJ                | 1.200.000  |  |
|   |    | 4) | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | OJ                | 1.000.000  |  |
|   |    | 5) | Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan   | OJ                | 900.000    |  |
|   |    | b. | Honorarium Moderator  | OK                | 700.000    |  |

|  |    |  |    |           |   |
|--|----|--|----|-----------|---|
|  | c. | Honorarium Pembawa Acara   | OK | 400.000   |   |
|  | d. | Honorarium Panitia   |    |           |   |
|  | 1) | Penanggung Jawab   | OK | 450.000   |   |
|  | 2) | Ketua/Wakil Ketua  | OK | 400.000   |   |
|  | 3) | Sekretaris   | OK | 300.000   |   |
|  | 4) | Anggota  | OK | 300.000   |   |
|  | 2. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan          |    |           |   |
|  | a. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |    |           |   |
|  | 1) | Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah   |    |           |   |
|  | a. | Pengarah   | OB | 1.500.000 |   |
|  | b. | Penanggung Jawab   | OB | 1.250.000 |   |
|  | c. | Ketua  | OB | 1.000.000 |   |
|  | d. | Wakil Ketua  | OB | 850.000   |   |
|  | e. | Sekretaris   | OB | 750.000   |   |
|  | f. | Anggota  | OB | 750.000   |   |
|  | 2) | Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah   |    |           |   |
|  | a. | Pengarah   | OB | 750.000   |   |
|  | b. | Penanggung Jawab   | OB | 700.000   |   |
|  | c. | Ketua  | OB | 650.000   |   |
|  | d. | Wakil Ketua  | OB | 600.000   |   |
|  | e. | Sekretaris   | OB | 500.000   |   |
|  | f. | Anggota  | OB | 500.000   |   |
|  | b. | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                    |    |           |   |
|  | 1) | Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah   |    |           |   |
|  | a. | Ketua/Wakil Ketua  | OB | 250.000   |   |
|  | b. | Anggota  | OB | 250.000   |   |
|  | 3. | Penerimaan Negara Bukan Pajak Seleksi Pengembangan Karir Pegawai Aparatur Negara | OK | 100.000   | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara |

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA